

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Diponegoro III No.1 Telp.(0537) 32773 - Kuala Kurun 74511

e-mail: transnakerkopukm1@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunianya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dapat tersusun.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2025) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026. Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Renja ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kuala Kurun, 16 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,

Hulnan, S.Pd.SD., M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP.196806111987121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Anggaran Per 04 Juni 2025	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025	13
Tabel 3.1	Matriks Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya tidak kesesuaian dengan perkembangan keadaan dan akibat terjadinya efesiensi anggaran di tahun 2025, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah;
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan subkegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan; dan
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten **Gunung Mas**, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 580);
23. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan 9 (sembilan) Program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Program utama tersebut akan dianalisis realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Per 04 Juni 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	17.607.300,00	16.847.300,00	760.000,00	95,68
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17.607.300,00	16.847.300,00	760.000,00	95,68
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	17.607.300,00	16.847.300,00	760.000,00	95,68
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	163.774.290,00	137.562.480,00	26.211.810,00	84,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	163.774.290,00	137.562.480,00	26.211.810,00	84,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	163.774.290,00	137.562.480,00	26.211.810,00	84,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.000.000,00	2.240.000,00	1.760.000,00	56,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	4.000.000,00	2.240.000,00	1.760.000,00	56,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	4.000.000,00	2.240.000,00	1.760.000,00	56,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	124.882.578,00	95.404.738,00	29.477.840,00	76,40
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.864.668,00	47.864.668,00	111.130.962,00	76,74
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	47.864.668,00	36.733.706,00	111.130.962,00	76,74
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77.017.910,00	58.671.032,00	18.346.878,00	76,18
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.775.410,00	54.965.332,00	12.810.078,00	81,10
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.242.500,00	3.705.700,00	5.536.800,00	40,09
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.116.211.118,77	2.713.177.074,00	3.403.034.044,00	43,52
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.617.978,00	11.704.100,00	12.913.878,00	47,54
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.456.558,00	9.589.500,00	9.867.058,00	49,29
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	991.100,00	-	991.100,00	0,00
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	988.900,00	-	988.900,00	0,00
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.122.120,00	2.114.600,00	7.520,00	99,65
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.059.300,00	-	1.059.300,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.247.126.598,77	2.205.339.429,00	3.041.787.169,00	42,03

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.147.879.779,77	2.156.316.877,00	2.991.562.902,77	41,89
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.102.220,00	32.984.052,00	36.118.168,00	47,73
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	28.348.400,00	16.038.500,00	12.309.900,00	56,58
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.796.199,00	-	1.796.199,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.271.430,00	3.895.700,00	145.375.730,00	2,61
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.571.400,00	2.785.700,00	2.785.700,00	50,00
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	143.700.030,00	1.110.000,00	142.590.030,00	0,77
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.715.264,00	175.004.684,00	101.710.580,00	63,24
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.040.730,00	3.372.000,00	3.668.730,00	47,89
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.820.530,00	4.647.900,00	10.172.630,00	31,36
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.258.730,00	3.275.000,00	7.983.730,00	29,09
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	81.722.540,00	20.386.000,00	61.336.540,00	24,95
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.947.534,00	141.363.784,00	17.583.750,00	88,94
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.925.200,00	1.960.000,00	965.200,00	67,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.611.350,00	19.240.000,00	19.371.350,00	49,83
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.611.350,00	19.240.000,00	19.371.350,00	49,83
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.250.048,00	239.685.361,00	72.564.687,00	61,22
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00	30,30
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.074.412,00	38.440.205,00	57.634.207,00	40,01
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.168.356,00	200.245.156,00	91.923.200,00	68,54
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.833.400,00	55.917.600,00	47.915.800,00	53,85
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.618.400,00	22.907.300,00	21.711.100,00	51,34
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	39.913.600,00	22.904.300,00	17.009.300,00	57,38

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.301.400,00	10.106.000,00	9.195.400,00	52,36
2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	2.396.400,00	2.390.200,00	6.200,00	99,74
2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.396.400,00	2.390.200,00	6.200,00	99,74
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72.560.610,00	60.379.659,00	12.180.951,00	83,21
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.560.610,00	60.379.659,00	12.180.951,00	83,21
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	72.560.610,00	60.379.659,00	12.180.951,00	83,21
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	148.263.399,42	54.111.116,00	94.152.283,00	36,50
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	148.263.399,42	54.111.116,00	94.152.283,00	36,50
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	148.263.399,42	54.111.116,00	94.152.283,00	36,50
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	60.363.648,00	47.218.900,00	13.144.748,00	78,22
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	60.363.648,00	47.218.900,00	13.144.748,00	78,22
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	33.218.048,00	21.169.300,00	12.048.748,00	63,73
3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	27.145.600,00	26.049.600,00	1.096.000,00	95,96
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	43.519.271,50	28.228.626,00	15.290.645,00	64,86
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	43.519.271,50	28.228.626,00	15.290.645,00	64,86
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	43.519.271,50	28.228.626,00	15.290.645,00	64,86
	TOTAL	6.869.086.285,69	3.155.169.893,00	3.713.916.392,69	45,93

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dilihat Laporan Realisasi Anggaran per 04 Juni 2025 menjelaskan bahwa 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 45,93% dari target kinerja sebesar 54,07%. Pagu tersebut merupakan pagu pergeseran anggaran sebesar **Rp.6.869.086.285,69,-** dari pagu awal Renja yakni sebesar Rp.8.128.991.281,00-. Artinya ada pengurangan sebesar Rp.1.259.904.995,31,- dari nilai awal Renja tahun 2025.

Perubahan Renja tahun 2025 ini menterjemahkan dari adanya ketidaksesuaian pagu anggaran, target kinerja dan program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Perubahan tersebut merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengarahkan efisiensi belanja sampai ke daerah (APBD).

Dampak dari efisiensi anggaran tersebut, berdampak pada kebijakan daerah juga yaitu dana aspirasi yang sebelumnya ada disetiap Perangkat Daerah, semuanya ditarik kembali dan dikelola dengan 1 (satu) pintu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dampak lain terhadap program dan kegiatan yaitu adanya pemotongan anggaran 50% (lima puluh persen) yang terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, belanja ATK dan Penggandaan, biaya pemeliharaan mobil/motor dinas, dan belanja bimtek.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dibawah ini.

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, pagu anggaran Rp.17.607.300,00,-dengan realisasi Rp.16.847.300,00,- atau sudah mencapai 95,68%. Kegiatan ini adalah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) yaitu merupakan penyusunan dokumen rencana tenaga kerja bagi daerah.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pagu Rp.163.774.290,00,- dengan realisasi Rp. 137.562.480,00,- dengan capaian 84%. Kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, kegiatan ini berupa pelatihan menjahit dan bantuan alat pertukangan.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja, pagu Rp.4.000.000,00,- dengan realisasi Rp. 2.240.000,00,- atau sudah terealisasi 56%. Kegiatan ini adalah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja atau merupakan kegiatan memfasilitasi bagi pencari kerja

untuk mengikuti/mendaftar di lowongan kerja yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui *job fair*/bursa kerja.

4. Program Hubungan Industrial, dengan pagu Rp.124.882.578,00- dengan realisasi Rp.95.404.738,00,- atau 76,40%. Kegiatan ini berisi 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp.47.864.668,00,- realisasi Rp.36.733.706,00,- capaian 76,74%.
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, pagu Rp.77.017.910,00,- realisasi Rp.58.671.032,00,- capaian 76,18%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dengan pagu Rp.6.234.115.188,77,- dengan realisasi Rp.2.713.177.074,00,- dengan capaian 43,52%. Kegiatan ini merupakan kegiatan sekretariat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu Rp.24.617.978,00,- realisasi Rp.11.704.000,00,- capaian 47,54%. Kendala yang dihadapi yaitu ada 3 (tiga) sub kegiatan yang belum ada realisasinya atau masih 0% seperti :
 - 1). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; dan
 - 3). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.Penyebabnya adalah belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaannya.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu Rp.5.247.126.598,77,- realisasi Rp.2.205.339.429,00,- capaian 42,03%. Ada 1 (satu) kegiatan yang belum ada realisasinya yaitu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Tidak ada kendala terkait dengan realisasi keuangan kegiatan tersebut.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu Rp.149.271.430,00,- realisasi masih rendah yaitu sebesar Rp.3.895.700,00,- atau capaian masih 2,61%. Hambatan yang dihadapi adalah kegiatan bimbingan teknis belum dilaksanakan, dengan nilai pagu Rp.143.700.030,00,-.

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu Rp.276.715.264,00,- realisasi Rp.175.004.684,00,- capaian 63,24%.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu Rp. 38.611.350,00,- realisasi Rp.19.240.000,00,- dengan capaian 49,83%. Dengan menyisakan anggaran sebesar Rp.19.371.350,00,- tersebut merupakan sisa untuk pembelian 2 (dua) unit printer yang sedang dalam proses pengadaan.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu Rp.391.542.768,00,- realisasi Rp.239.685.361,00,- dengan capaian 61,22%.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu Rp.103.833.400,00,- realisasi Rp.55.917.600,00,- capaian 53,85%.
 - h. Penataan Organisasi, pagu Rp.2.396.400,00,- dengan realisasi sudah mencapai Rp.2.390.200,00,- capai 99,74% atau sudah mencapai 100% dilaksanakan.
- 6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, pagu Rp.72.560.610,00,- dengan realisasi Rp.60.379.659,00,- dengan capain 83,21%. Kegiatan ini berupa Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dengan nilai pagu Rp.148.263.399,42,- realisasi Rp.54.111.116,00,- capaian 36,50%.
 - 8. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, pagu Rp.60.363.648,00,- realisasi Rp.47.418.900,00,- dengan capaian 78,22%.
 - 9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pagu Rp.43.519.271,50,- realisasi Rp.28.228.626,00,- capaian 64,86%.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100.000.000	97,37	111.974.548	100	58.340.974	89,50	52.213.554	89,50	164.188.102	100	99.483.150	95,68	16.847.300	16,84	
1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	1	100.000.000	1	111.974.548	1	58.340.974	1	52.213.554	89,50	164.188.102	1	99.483.150	1	16.847.300	16,84	
1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	100.000.000	1	111.974.548	1	58.340.974	1	52.213.554	89,50	164.188.102	1	99.483.150	1	16.847.300	16,84	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2	284.553.290	99,22	27.781.8654	100	264.553.290	98,25	259.912.626	98,25	537.731.280	100	284.553.290	84	137.562.480	48,34	
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan SDM	1	284.553.290	1	27.781.8654	1	264.553.290	1	259.912.626	98,25	537.731.280	1	284.553.290	84	137.562.480	48,34	
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	25	284.553.290	25	27.781.8654	20	264.553.290	20	259.912.626	98,25	537.731.280	20	284.553.290	25	137.562.480	48,34	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	7	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	2.240.000	4,48	
3.1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi pasar kerja yang terkelola	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	2.240.000	4,48	
3.1.1	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.240.000	4,48	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100	177.145.220	99,58	206.037.993	100	182.574.264	99,35	181.379.780	99,35	387.417.773	100	177.145.220	76,40	146.664.370	82,79	
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	1	49.756.530	1	127.540.029	1	49.756.530	1	49.664.030	99,81	177.204.059	1	49.756.530	1	36.733.706	73,82	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
4.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	49.756.530	1	127.540.029	1	49.756.530	1	49.664.030	99,81	177.204.059	1	49.756.530	1	36.733.706	73,82	
4.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial	1	127.388.690	1	78.497.964	1	132.817.734	1	131.715.750	99,17	210.213.714	1	127.388.690	1	109.930.664	86,29	
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	114.324.020	5	66.592.864	5	119.753.064	5	118.922.950	99,31	185.515.814	5	114.324.020	4	54.965.332	48,07	
4.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseskaikan	5	13.064.670	5	66.592.864	5	13.064.670	5	12.792.800	97,92	24.697.900	5	13.064.670	2	3.705.700	28,36	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	6.445.532.167	96,01	5.264.438.740	100	6.596.639.271	100	6.212.484.760	94,18	11.523.265.500	100	6.325.275.312	43,52	2.719.177.074	42,18	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100	38.146.272	97,55	10.278.000	100	48.603.136	100	48.192.544	99,16	58.470.544	100	38.146.272	47,54	11.704.100	30,68	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2	27.609.890	2	-	3	38.066.754	3	37.785.944	99,26	37.785.944	3	27.609.890	1	9.589.500	34,73	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	3.205.642	2	3.047.800	2	3.205.642	2	3.175.900	99,07	6.223.700	2	3.205.642	0	-	-	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.090.020	1	2.993.600	1	3.090.020	1	2.997.500	99,01	5.991.100	1	3.090.020	0	-	-	
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.122.120	2	2.121.000	2	2.122.120	2	2.114.600	99,65	4.235.600	2	2.122.120	2	2.114.600	99,64	
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.118.600	1	2.115.600	1	2.118.600	1	2.118.600	100	4.234.200	1	2.118.600	1	-	-	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100	5.043.637.806	94,77	3.487.391.479	100	5.012.048.691	93,27	4.674.782.404	93,27	8.162.173.883	100	4.926.351.698	42,03	2.205.339.429	43,72	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	4.950.550.000	33	3.380.132.587	49	4910.881.940	49	4.575.765.339	93,18	7.955.897.926	47	4.833.263.892	47	2.156.316.877	43,55	
5.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	58.287.856	1	67.673.728	1	89.598.944	1	87.657.688	97,83	155.331.416	1	58.287.856	1	32.984.052	56,58	
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	2.915.130	1	2.882.100	1	2.915.130	1	2.882.100	98,87	5.764.200	1	2.915.130	1	16.038.500	550	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
5.2. 4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	31.884.820	1	36.703.064	1	8.652.677	1	8.477.277	97,9 7	45.180.341	1	31.884.820	0	-	-	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	69.020.460	99,8 6	112.381.367	100	69.020.460	100	68.969.035	99,9 3	181.350.402	100	69.020.460	2,61	3.895.700	5,64	
5.3. 1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.785.700	-	
5.3. 2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	69.020.460	10	112.381.367	10	69.020.460	10	68.969.035	99,9 3	181.350.402	10	69.020.460	10	1.110.000	1,60	
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100	536.645.559	99,8 4	717.794.428	100	568.572.559	100	657.216.119	99,7 9	1.375.010.547	100	536.645.559	63,24	175.004.684	32,61	
5.4. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.028.520	1	6.993.074	1	7.028.520	1	6.866.200	97,6 9	13.859.274	1	7.028.520	1	3.372.000	47,97	
5.4. 2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	31.468.500	1	31.377.900	1	31.468.500	1	31.395.000	99,7 7	62.772.900	1	31.468.500	1	4.647.900	14,77	
5.4. 3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	11.258.730	5	10.910.000	5	13.258.730	5	13.210.000	99,6 3	24.120.000	5	11.258.730	5	3.275.000	29,08	
5.4. 4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	113.050.089	1	87.423.500	1	92.977.089	1	92.508.155	99,5 0	179.931.655	1	113.050.089	1	20.386.000	18,03	
5.4. 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	373.839.720	1	581.089.954	1	513.839.720	1	513.236.764	99,8 8	1.094.326.718	1	373.839.720	1	141.363.784	37,81	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026		
																	%	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
5.4. 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.960.000	-	
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	56.832.000	97,67	8.455.856	100	122.021.190	100	118.869.300	97,42	127.325.156	100	56.832.000	49,83	19.240.000	33,85	
5.5. 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	2	53.946.000	2	51.800.000	96,02	51.800.000	-	-	-	-	-	-
5.5. 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	56.832.000	1	8.455.856	5	68.075.190	1	67.069.300	98,52	75.525.156	1	56.832.000	1	19.240.000	33,85	
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	354.054.119	95,33	802.652.784	100	342.148.031	100	304.619.790	89,03	127.325.156	100	354.054.119	61,22	239.685.361	67,69	
5.6. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.300.000	1	2.290.000	1	3.300.000	1	3.300.000	100	5.590.000	1	3.300.000	1	1.000.000	30,30	
5.6. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	96.074.412	2	63.523.192	2	94.074.412	2	62.475.477	66,41	125.998.669	2	96.074.412	2	38.440.205	40,01	
5.6. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	254.679.707	1	736.839.592	1	244.773.619	1	238.844.313	97,58	975.683.905	1	254.679.707	1	200.245.156	78,62	
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	340.842.569	98,16	122.226.526	100	340.842.569	100	336.469.968	98,72	505.038.494	100	340.842.569	53,85	55.917.600	16,40	
5.7. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	41.171.871	1	40.626.300	1	41.171.871	1	40.270.368	97,81	80.896.668	1	41.171.871	1	22.907.300	55,63	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																
5.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	83.119.388	10	62.315.226	10	83.119.388	10	80.060.650	96,32	142.375.876	10	83.119.388	10	22.904.300	27,55	
5.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	19.492.500	12	19.285.000	12	19.492.500	12	19.450.000	99,78	38.735.000	12	19.492.500	12	10.106.000	51,84	
5.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1	197.058.810	1	196.688.950	99,81	243.030.950	1	-	-	-	-	
5.8	Penataan Organisasi	Penataan organisasi yang dilaksanakan	100	6.353.382	96,32	3.258.300	100	3.382.635	100	3.365.600	99,50	6.623.900	100	3.382.635	99,74	2.390.200	37,62	
5.8.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	6.353.382	1	3.258.300	1	3.382.635	1	3.365.600	99,50	6.623.900	1	3.382.635	1	2.390.200	37,62	
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	100	100.000.000	99,22	116.773.900	100	138.854.264	98,83	137.227.194	98,83	137.227.194	100	133.045.220	83,21	60.379.659	60,37	
6.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang terselenggara	1	100.000.000	1	116.773.900	1	138.854.264	1	137.227.194	98,83	137.227.194	1	133.045.220	1	60.379.659	60,37	
6.1.1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	100.000.000	10	116.773.900	10	138.854.264	10	137.227.194	98,83	137.227.194	10	133.045.220	10	60.379.659	60,37	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100	450.000.000	99,73	370.158.615	100	239.000.000	66,39	158.670.700	66,39	158.670.700	100	403.000.000	36,50	54.111.116	12,02	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET RENJA PD TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				TARGET REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp.	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW.II 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2026	
									K	Rp.	K	Rp.			%			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 10/4x100 %	(12)
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM yang terdata	1	450.000.000	1	370.158.615	1	239.000.000	1	158.670.700	66,39	158.670.700	1	403.000.000	1	54.111.116	12,02	
7.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	10	450.000.000	10	370.158.615	10	239.000.000	10	158.670.700	66,39	158.670.700	10	403.000.000	10	54.111.116	12,02	
8	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	129.045.220	99,55	258.678.937	1	105.813.077	1	104.716.583	98,96	363.395.520	1	129.045.220	1	47.218.900	36,59	
8.1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	1	129.045.220	1	258.678.937	1	105.813.077	1	104.716.583	98,96	363.395.520	1	129.045.220	1	47.218.900	36,59	
8.1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	50.000.000	1	49.897.600	1	50.000.000	1	49.540.089	99,08	99.437.689	1	50.000.000	1	21.169.300	42,33	
8.1.2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1	79.045.220	1	208.781.337	1	55.813.077	1	55.176.494	98,86	263.957.831	1	79.045.220	1	26.049.600	32,95	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	75	77.145.220	99,38	181.446.189	86	82.574.264	98,96	81.716.044	98,96	263.162.233	75	77.145.220	64,86	28.228.626	36,59	
9.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	1	77.145.220	1	181.446.189	1	82.574.264	1	81.716.044	98,96	263.162.233	1	77.145.220	1	28.228.626	36,59	
9.1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	400	77.145.220	300	181.446.189	400	82.574.264	300	81.716.044	98,96	263.162.233	400	77.145.220	300	28.228.626	36,59	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berdasarkan Renja Awal adalah 9 (sembilan) program dengan anggaran sebesar Rp.7.628.692.632,- dengan rincian program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi; dan
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Matriks Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							7.628.692.632,00	8.128.991.281,88	6.869.086.285,69							7.628.692.632,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.422.502.192,00	7.948.553.081,88	6.765.203.366,19							7.422.502.192,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							561.181.660,00	768.438.200,00	310.264.168,00							561.181.660,00	
1	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-				-	-	99.483.150,00	67.952.620,00	17.607.300,00							99.483.150,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	-	99.483.150,00	67.952.620,00	67.952.620,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/ Pelaku Usaha di Daerah	-		99.483.150,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	99.483.150,00	67.952.620,00	17.607.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/ Pelaku Usaha di Daerah			99.483.150,00	DTTKUKM
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	284.553.290,00	494.685.680,00	163.774.290,00							284.553.290,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	-	284.553.290,00	494.685.680,00	494.685.680,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/ Pelaku Usaha di Daerah	-		284.553.290,00	

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.07.03.2.01. 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	25 Orang	284.553.29 0,00	494.685.68 0,00	163.774.29 0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah			284.553.290,00	DTTKUKM
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	0,00	25.361.700, 00	4.000.000,0 0							0,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	-	0,00	25.361.700, 00	25.361.700, 00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/ Pelaku Usaha di Daerah	-		0,00	DTTKUKM
	2.07.04.2.03. 0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				-	5 Orang	0,00	25.361.700, 00	4.000.000,0 0	Kab. Gunung Mas, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/ Pelaku Usaha di Daerah			0,00	DTTKUKM
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	177.145.22 0,00	180.438.20 0,00	124.882.57 8,00							177.145.220,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	-	-			-	-	49.756.530, 00	66.861.670, 00	66.861.670, 00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah	-		49.756.530,00	

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah				
	2.07.05.2.01. 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Lapor an	1 Lapor an	49.756.530, 00	66.861.670, 00	47.864.668, 00	Kab. Gunu ng Mas, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah			49.756.530,00	DTTKUKM
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	127.388.69 0,00	113.576.53 0,00	113.576.53 0,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah	-		127.388.690,00	
	2.07.05.2.02. 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkar a	5 Perkar a	114.324.02 0,00	92.093.000, 00	67.775.410, 00	Kab. Gunu ng Mas, Semu a Keca matan , Semu a	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah			114.324.020,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												Kel/D esa							
	2.07.05.2.02. 0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkar a	5 Perkar a	13.064.670, 00	21.483.530, 00	9.242.500,0 0	Kab. Gunu ng Mas, Semu a Keca matan / Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah			13.064.670,00	DTTKUKM
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							6.861.320.5 32,00	7.180.114.8 81,88	6.454.939.1 98,19							6.861.320.532, 00	
5	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	6.325.275.3 12,00	6.714.296.6 82,46	6.234.115.1 88,77							6.325.275.312, 00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	38.146.272, 00	53.146.272, 00	53.146.272, 00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital	-		38.146.272,00	
	2.17.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Doku men	1 Doku men	27.609.890, 00	42.609.890, 00	19.456.558, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			27.609.890,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Doku men	1 Doku men	3.205.642,0 0	3.205.642,0 0	991.100,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun,	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			3.205.642,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Kuala Kurun							
	2.17.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	3.090.020,0 0	3.090.020,0 0	988.900,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			3.090.020,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	2.122.120,0 0	2.122.120,0 0	2.122.120,0 0	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			2.122.120,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	2.118.600,0 0	2.118.600,0 0	1.059.300,0 0	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			2.118.600,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.926.351.6 98,00	5.465.302.5 27,46	5.465.302.5 27,46			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital	-		4.926.351.698, 00	

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.17.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang /bulan	53 Orang /bulan	4.833.263.8 92,00	5.379.837.3 82,46	5.147.879.7 79,77	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokas i Umu m (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			4.833.263.892, 00	DTTKUKM
	2.17.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lapor an	1 Lapor an	58.287.856, 00	38.353.816, 00	69.102.220, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			58.287.856,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD				2 Lapor an	2 Lapor an	2.915.130,0 0	43.315.130, 00	28.348.400, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokas i Umu m (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			2.915.130,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis				1 Doku men	1 Doku men	31.884.820, 00	3.796.199,0 0	1.796.199,0 0	Kab. Gunu ng Mas, Kurun,	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			31.884.820,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Realisasi Anggaran									Kuala Kurun							
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.020.460,00	166.573.180,00	166.573.180,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		69.020.460,00	
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	2 Doku men	0,00	10.235.800,00	5.571.400,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	69.020.460,00	156.337.380,00	143.700.030,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			69.020.460,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	536.645.559,00	543.252.960,00	543.252.960,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital	-		536.645.559,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.028.520,00	7.040.730,00	7.040.730,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Kuala Kurun	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			7.028.520,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.468.500,00	31.468.500,00	14.820.530,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			31.468.500,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												ang Anjir							
	2.17.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Doku men	3 Doku men	11.258.730. 00	11.258.730. 00	11.258.730. 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			11.258.730,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	113.050.08 9,00	113.059.08 0,00	81.722.540, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			113.050.089,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lapor an	1 Lapor an	373.839.72 0,00	373.839.72 0,00	158.947.53 4,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			373.839.720,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah n Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Doku men	0,00	6.586.200,0 0	2.925.200,0 0	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital			0,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-			-	-	56.832.000. 00	25.974.000. 00	25.974.000, 00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah n ke arah digital	-		56.832.000,00	

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemerintah Daerah																	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	56.832.000,00	25.974.000,00	38.611.350,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			56.832.000,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	354.054.119,00	277.300.408,00	277.300.408,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		354.054.119,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.300.000,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.074.412,00	96.074.412,00	96.074.412,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			96.074.412,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	254.679.707,00	177.925.996,00	292.168.356,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			254.679.707,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	340.842.569,00	179.364.700,00	179.364.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan	-		340.842.569,00	

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													n ke arah digital				
	2.17.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	41.171.871, 00	71.661.000, 00	44.618.400, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			41.171.871,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	83.119.388, 00	88.402.300, 00	39.913.600, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			83.119.388,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	19.492.500, 00	19.301.400, 00	19.301.400, 00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			19.492.500,00	DTTKUKM
	2.17.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	197.058.81 0,00	0,00	0,00	Kab. Gunu ng Mas, Kurun, Tumb ang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintaha n ke arah digital			197.058.810,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	-	3.382.635,00	3.382.635,00	3.382.635,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.382.635,00	
	2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.382.635,00	3.382.635,00	2.396.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.382.635,00	DTTKUKM
6	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-				-	-	133.045.220,00	105.818.200,00	72.560.610,00							133.045.220,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	133.045.220,00	105.818.200,00	105.818.200,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah	-		133.045.220,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	133.045.220,00	105.818.200,00	72.560.610,00	Kab. Gunung Mas, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah			133.045.220,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	403.000.00 0,00	359.999.99 9,42	148.263.39 9,42							403.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	-	403.000.00 0,00	359.999.99 9,42	359.999.99 9,42			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah	-		403.000.000,00	
	2.17.07.2.01. 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampinga n Terhadap Usaha Mikro				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	403.000.00 0,00	359.999.99 9,42	148.263.39 9,42	Kab. Gunu ng Mas, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/P elaku Usaha di Daerah			403.000.000,00	DTTKUKM
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							206.190.44 0,00	180.438.20 0,00	103.882.91 9,50							206.190.440,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							206.190.44 0,00	180.438.20 0,00	103.882.91 9,50							206.190.440,00	
8	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	129.045.22 0,00	145.000.00 0,00	60.363.648, 00							129.045.220,00	

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	-	129.045.22 0,00	145.000.00 0,00	145.000.00 0,00			-	Pembanguna n dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraa an Masyarakat sesuai kewenangann ya	-		129.045.220,00	
	3.32.02.2.01. 0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Doku men	1 Doku men	50.000.000, 00	90.000.000, 00	33.218.048, 00	Kab. Gunu ng Mas, Runga n, Tumb ang Jutuh	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembanguna n dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraa an Masyarakat sesuai kewenangann ya			50.000.000,00	DTTKUKM
	3.32.02.2.01. 0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawas an Trans migra si	1 Kawas an Trans migra si	79.045.220, 00	55.000.000, 00	27.145.600, 00	Kab. Gunu ng Mas, Runga n, Tumb ang Jutuh	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembanguna n dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan			79.045.220,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
															Perumahan) bagi kesejahteraa an Masyarakat sesuai kewenangann ya				
9	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGA N KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	77.145.220,00	35.438.200,00	43.519.271,50							77.145.220,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	-	77.145.220,00	35.438.200,00	35.438.200,00			-	Pembanguna n dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraa an Masyarakat sesuai kewenangann ya	-		77.145.220,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				300 Kepal a Kelu ar ga	300 Kepal a Kelu ar ga	77.145.220,00	35.438.200,00	43.519.271,50	Kab. Gunu ng Mas, Runga n, Tumb ang Jutuh	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pembanguna n dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraa an Masyarakat			77.145.220,00	DTTKUKM

N O.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (RP)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025			NASION AL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
															sesuai kewenangann ya				
	J U M L A H								7.628.692.6 32,00	8.128.991.2 81,88	6.869.086.2 85,69							7.628.692.632, 00	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas. Perubahan Renja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Semoga Perubahan Rencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kuala Kurun, 16 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,

Hulnan, S.Pd.SD., M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP.196806111987121002